

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuad, I., 2005, *Dasar-dasar Pendidikan*, Rineka Cipta Jakarta.
- Harsono, 2011, *Etnografi Pendidikan Sebagai Desain Penelitian Kualitatif*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Imron, A., 1995, *Pembinaan Guru di Indonesia*, Pustaka Jaya.
- Ismail, N., 2009, *Public Policy*. PMN, Surabaya.
- Noeng, M, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Nugroho, R., 2008, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Stoner, e. a., 1996, *Manajemen Terj. Alexander Sindoro*, Prenhallindo, Jakarta.
- Suharyo, 2011, *Pembentukan Otonomi Khusus di Bali dan Pengaruhnya bagi Keutuhan NKRI*, Hasil Penelitian, BPHN, Jakarta.
- Sunarso, 2006, *Dinamika Hubungan Kekuasaan Pusat dan Daerah di Indonesia. Jurusan Pkn dan Hukum Fise*, UNY, Yogyakarta.
- Surbakti, R., 1984, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Syarafuddin, A, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi kedua*, BPFE, Yogyakarta.
- Tirtarahardja, U., 2005, *Pengantar Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Wahab, A., 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Zamroni, 2000, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Biagraf Publishung, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

C. Makalah/Jurnal

Hernimawati, 2017, *Agenda Kebijakan Publik pada Badan Perpustakaan dan Arsip (BPA) Kota Pekanbaru*, Jurnal Niara Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.

D. Skripsi/Thesis/Disertasi

Budi, Moh. Waspa, 2015, *Kebijakan Publik Menghadap Tantangan (Pengalihan Kewenangan SMA dan SMK KE Provinsi Di Kota Metro*, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, STISIPOL Dharma Wacana Metro.

Damayanti, Sella Nova, 2017, *Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Surabaya.

Rizki, Shinta F., 2017, *Pengalihan Kewenangan Penyelenggara Pendidikan Menengah Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi: Studi Kasus Persiapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah*, Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro, Semarang.

E. Internet

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Penjamin Mutu Pendidikan, 2016, <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/berita/aplikasi-dapodik-adalah-alat-dan-instrumen-pendataan-satuan-pendidikan>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

Kirana, "Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti", <http://repository.uin-suska.ac.id/4903/3/BAB%20II.pdf>, diakses 11 September 2018.

Riau, P., "Diskusi Publik Isu Arah Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti menuju Masyarakat Madani dalam Bingkai NKRI", <http://porosriau.com/pendidikan/diskusi-publik-isnu--arah-kebijakan-pendidikan-di-kabupaten-kepulauan-meranti-menuju-masyarakat-madani-dalam-bingkai-nkr>, diakses 18 September 2018.

Riau, U., "Wakil Bupati Meranti Ikuti Diskusi Arah Kebijakan Kabupaten Kepulauan Meranti Menuju", <http://m.utusanriau.co/index.php?det/36902/wakil-bupati-meranti-ikuti-diskusi-arrah-kebijakan-kabupaten-kepulauan-meranti-menuju/2018-08-2>, diakses tanggal 18 September 2018.

Wibowo, Guruh B, 2018, "Puluhan Desa 3T di Meranti Menunggu Layanan Internet dari Pemerintah Pusat", <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/11/26/puluhan-desa-3t-di-meranti-menunggu-layanan-internet-dari-pemerintah-pusat>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

Wikipedia, 2017, https://id.wikipedia.org/wiki/Data_pokok_pendidikan, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.